



Jurnal Teologi (JUTEOLOG)

Vol. 06 No. 01 (December 2025) hlm. 79 – 97

Jurnal Teologi (JUTEOLOG)

e-ISSN 2775-4006

<https://ejurnal.sttkadesiyogyakarta.ac.id/index.php/juteolog>

p-ISSN 2774-9355



<https://doi.org/10.52489/juteolog.6i1.272>

Nilai-nilai Teologis tentang “Tidak Ada yang Berkelebihan dan Tidak Ada yang Berkekurangan” Berdasarkan 2 Kor. 8:13-15 dan Relevansinya bagi Praktek Gereja Masa Kini

Ricard Lieberth¹⁾, Yanto Paulus Hermanto²⁾

STT Kharisma Bandung, htreibeil88@gmail.com

Recommended Citation

Turabian 8th edition (full note)

Ricard Lieberth and Yanto Paulus Hermanto., “Nilai-nilai Teologis tentang Tidak Ada yang Berkelebihan dan Tidak ada yang Berkekurangan Berdasarkan 2 Kor. 8:13-15 dan Relevansinya bagi Praktek Gereja Masa Kini.” Jurnal Teologi (JUTEOLOG) 6, no. 1 (Desember 16, 2025): 79-97, accessed December 16, 2025, <https://doi.org/10.52489/juteolog.v6i1.272>

American Psychological Association 7th edition

(Lieberth & Hermanto, 2025, p.1).

Received: 22 September 2025	Accepted: 08 December 2025	Published: 16 December 2025
-----------------------------	----------------------------	-----------------------------

This Article is brought to you for free and [open access](#) by Sekolah Tinggi Teologi Kadesi Yogyakarta. It has been accepted for inclusion in Christian Perspectives in Education by an authorized editor of Jurnal Teologi (JUTEOLOG).

For more information, please contact htreibeil88@gmail.com

Abstract

This study examines the principle of equality in the body of Christ based on 2 Corinthians 8:13–15, particularly the idea that “no one has too little and no one has too much.” The issue is significant because socio-economic injustice and inequality remain real challenges for the contemporary church. The purpose of this research is to explore the Christian ethical meaning of the text and its implications for the praxis of today’s church. The method employed is a theological literature review and biblical exegesis with an applied ethics approach. The findings highlight a novelty that Paul’s principle is not merely a charitable teaching, but a paradigm of equity rooted in the love of Christ. This discovery is important as it reaffirms the church’s calling to embody tangible solidarity that fosters equality within the body of Christ and the wider society.

Keywords: 2 Corinthians 8:13–15, Christian ethics, equality, church solidarity, equity

Abstrak

Penelitian ini membahas prinsip kesetaraan dalam tubuh Kristus berdasarkan 2 Korintus 8:13–15, khususnya tentang “tidak ada yang berkekurangan dan tidak ada yang berkelebihan.” Masalah ini penting karena ketidakadilan sosial-ekonomi dan kesenjangan dalam kehidupan jemaat masih menjadi tantangan nyata di gereja masa kini. Tujuan penelitian ini adalah menggali makna etika Kristen dari teks tersebut dan implikasinya bagi praksis gereja kontemporer. Metode yang digunakan adalah kajian literatur teologis dan eksegesis Alkitab dengan pendekatan etika terapan. Hasil penelitian menunjukkan kebaruan berupa penekanan bahwa prinsip Paulus bukan sekadar ajaran karitatif, melainkan paradigma pemerataan yang berakar pada kasih Kristus. Penemuan ini penting karena menegaskan kembali panggilan gereja untuk menghadirkan solidaritas nyata yang membangun kesetaraan dalam tubuh Kristus dan masyarakat luas.

Kata Kunci: 2 Korintus 8:13–15, etika Kristen, kesetaraan, solidaritas gereja, pemerataan

PENDAHULUAN

Kesenjangan sosial-ekonomi merupakan salah satu isu paling mendesak dalam masyarakat Indonesia masa kini. Data Badan Pusat Statistik mencatat bahwa rasio gini Indonesia pada 2023 masih berada di angka 0,388, yang menandakan ketidaksetaraan distribusi pendapatan belum teratasi secara signifikan (Purwanti, 2024). Ketidakadilan ini memicu frustrasi publik, menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah, dan memperlebar jurang antara kelompok kaya dan miskin. Dalam situasi demikian, gereja dipanggil untuk tidak hanya berkhotbah tentang keselamatan rohani, tetapi juga menghadirkan kesaksian nyata tentang keadilan sosial (Stott & Wyatt, 2006).

Dalam perspektif Alkitab, kekayaan bukanlah dosa dan kemiskinan bukanlah kebajikan pada dirinya sendiri. Yang diperkarakan adalah ketidakadilan yang timbul dari penyalahgunaan kekayaan dan pengabaian terhadap sesama (Ul. 15:7–11; Ams. 14:31). Yesus sendiri tidak mengecam orang kaya sebagai golongan, tetapi pola hidup yang menindas atau menutup hati terhadap saudara (Luk. 12:15; 1Tim. 6:17–19). Karena itu, persoalan kaya–miskin dalam 2 Korintus 8:13–15 bukan menyalahkan status ekonomi,

melainkan menegaskan panggilan tubuh Kristus untuk menjaga keseimbangan relasional dan ekonomi secara etis.

Kesenjangan sosial tidak hanya menjadi fenomena nasional, tetapi juga tampak dalam kehidupan internal gereja-gereja di Indonesia. Studi menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi global dan nasional mendorong munculnya jurang kesejahteraan bahkan di antara komunitas religius, termasuk jemaat gereja urban (Milanovic, 2016). Dalam banyak konteks, gereja menemukan bahwa sebagian jemaat menikmati akses luas terhadap pendidikan dan pekerjaan, sementara sebagian lainnya hidup dalam kerentanan ekonomi dan keterbatasan kesempatan. Meskipun demikian, respons gereja sering kali masih bersifat karitatif jangka pendek dan belum menyentuh akar struktural kemiskinan, sebagaimana dikritisi dalam literatur diakonia transformasional (Banjarnahor & Siagian, 2025). Situasi inilah yang mendorong pentingnya meninjau kembali prinsip teologis Paulus dalam 2 Korintus 8:13–15, karena gereja dipanggil tidak hanya melayani kebutuhan mendesak, tetapi juga berperan dalam menghadirkan keadilan sosial yang lebih luas (Padakari & Gulo, 2025). Gereja di Indonesia tidak dapat menutup mata terhadap fakta bahwa keadilan sosial adalah panggilan iman, bukan sekadar agenda politik. Sebagaimana ditegaskan oleh teolog publik bahwa spiritualitas Kristen sejati selalu bersifat inkarnasional, hadir di tengah penderitaan dan realitas sosial masyarakat (Barrett, 1998). Dalam terang konteks tersebut, frase Paulus dalam 2 Korintus 8:13–15, “tidak ada yang berkekurangan dan tidak ada yang berlebihan,” memiliki relevansi yang kuat. Frase ini muncul dalam konteks pengumpulan sumbangan bagi jemaat Yerusalem, namun maknanya melampaui sekadar bantuan karitatif. Ia merupakan paradigma etis yang menekankan pemerataan, solidaritas, dan keseimbangan dalam tubuh Kristus (Wright, 2004). Penekanan Paulus ini menantang gereja masa kini untuk menolak logika ketimpangan dan menegaskan prinsip kesetaraan sebagai wujud kasih Kristus.

Namun, penelitian-penelitian sebelumnya sering kali menyoro 2 Korintus 8 hanya dari perspektif teologi memberi (*stewardship*) atau praktik filantropi gereja, sementara dimensi struktural dari frase “tidak ada yang berkekurangan dan tidak ada yang berlebihan” jarang digali secara mendalam (Blomberg, 2001; Garland, 2021; Downs, 2016). Padahal, beberapa kajian sosiologis Paulus menegaskan bahwa kolekte Paulus tidak bisa hanya dipahami sebagai praktik filantropi, melainkan sebagai strategi teologis yang menghubungkan komunitas Kristen lintas konteks sosial dan ekonomi (Georgi, 1992). Hal ini menunjukkan bahwa teks ini dapat dibaca sebagai etika pemerataan yang relevan dengan konteks masyarakat modern yang sarat dengan krisis distribusi kekayaan. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty research*) dengan menempatkan frase tersebut sebagai kerangka etika Kristen untuk menjawab persoalan ketidakadilan sosial-ekonomi kontemporer.

Masalah yang diteliti dalam makalah ini adalah bagaimana gereja masa kini dapat mempraktikkan prinsip “tidak ada yang berkekurangan dan tidak ada yang berlebihan” di tengah realitas kesenjangan sosial yang semakin tajam. Pertanyaan kunci yang diajukan adalah: *Bagaimana prinsip pemerataan yang diajarkan Paulus dalam 2 Korintus 8:13–15 dapat diterjemahkan menjadi praksis nyata dalam kehidupan gereja serta bagaimana implikasinya di Indonesia?*

Tujuan penelitian ini adalah menggali makna teologis dan etis dari frase tersebut serta merumuskan implikasinya bagi gereja kontemporer, khususnya dalam membangun solidaritas jemaat dan memperjuangkan pemerataan ekonomi. Dengan penelitian ini, penulis berharap gereja dapat menemukan kerangka praktis yang menolongnya menjadi agen pemulihan sosial. Relevansi prinsip “tidak ada yang berkekurangan dan tidak ada yang berlebihan” diharapkan tidak berhenti pada wacana teologis, melainkan diwujudkan dalam bentuk solidaritas ekonomi jemaat, pelayanan yang berpihak pada yang lemah, serta praktik kepemimpinan yang transparan dan adil. Dengan demikian, gereja dapat menghadirkan tanda-tanda shalom Allah melalui kehidupan jemaat yang saling menopang, serta menjadi saksi profetis bagi masyarakat luas di tengah krisis ketidakadilan dan kesenjangan sosial.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur teologis (*literature review*). Fokus penelitian diarahkan pada telaah eksegetis terhadap 2 Korintus 8:13–15 serta kajian etika Kristen yang relevan dengan isu kesetaraan dan solidaritas gereja. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, berupa sumber-sumber tertulis dari Alkitab, buku-buku teologi sistematika, etika Kristen, tafsiran Alkitab, serta artikel jurnal akademik yang membahas pemerataan ekonomi dan peran sosial gereja. Sumber data diperoleh melalui pustaka teologi klasik maupun kontemporer, termasuk literatur lokal yang menyinggung konteks Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu membaca, menyeleksi, dan mengklasifikasi sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian. Teks Alkitab ditafsirkan menggunakan pendekatan historis-gramatikal, sehingga makna asli dari frase “tidak ada yang berkekurangan dan tidak ada yang berlebihan” dapat dipahami sesuai konteks surat Paulus kepada jemaat Korintus. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, dengan langkah: mengidentifikasi makna teologis dari teks Alkitab; menghubungkannya dengan literatur etika Kristen tentang integritas, keadilan, dan solidaritas; serta menarik implikasi praktis bagi gereja masa kini. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menjawab rumusan masalah sekaligus menawarkan kerangka aplikatif bagi gereja dalam mempraktikkan prinsip pemerataan di tubuh Kristus. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka (*library research*). Metodologi literatur mengikuti prinsip analisis tematik seperti yang dijelaskan dalam Research Design, yaitu proses identifikasi tema, coding, dan interpretasi teks (Creswell & Creswell, 2017). Untuk eksegeze, pendekatan historis-kritis digunakan sebagaimana dijelaskan dalam How to Read the Bible for All Its Worth (Fee & Stuart, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konteks Teologis: Frase dalam 2 Korintus 8:13–15

Frase “tidak ada yang berkekurangan dan tidak ada yang berlebihan” dalam 2 Korintus 8:13–15 muncul dalam konteks Paulus yang menggalang dukungan bagi jemaat Yerusalem yang sedang mengalami kemiskinan. Secara historis, jemaat Yerusalem hidup di bawah tekanan politik Romawi, krisis ekonomi akibat kelaparan di wilayah Yudea, serta marginalisasi sebagai komunitas Kristen awal (Georgi, 1986). Karena itu, Paulus melihat

kebutuhan bukan hanya sebagai persoalan material, melainkan kesempatan untuk memperkuat solidaritas lintas etnis antara jemaat Yahudi dan non-Yahudi. Dengan menghubungkan Korintus—kota kosmopolitan yang relatif makmur—dengan Yerusalem yang miskin, Paulus menekankan dimensi eklesiologis dari solidaritas tersebut (Furnish, 1984). Paulus menekankan bahwa pengumpulan persembahan bukanlah bentuk pemaksaan, tetapi sebuah prinsip kesetaraan dalam tubuh Kristus. Ia menyatakan, “Supaya ada keseimbangan,” sehingga yang berkelebihan dapat menolong yang kekurangan, dan pada akhirnya yang mendapatkan banyak tetapi tidak berkelebihan dan yang mendapatkan sedikit tidak berkekurangan, dan dapat dikatakan seperti kondisi yang ideal dan merata, sebagaimana Allah dahulu mencukupkan manna untuk bangsa Israel di padang gurun (2Kor. 8:15).

Temuan penting dari bagian ini adalah bahwa prinsip yang Paulus ajarkan bukanlah bentuk filantropi satu arah, tetapi menempatkan pengumpulan sebagai tindakan rekiproksi yang bertujuan ‘supaya ada keseimbangan’ sehingga prinsip kekristenan mengarah kepada solidaritas struktural serta paradigma etis yang berakar pada kasih Kristus (Blomberg, 2001). menegaskan bahwa teologi kepemilikan dalam Perjanjian Baru selalu menekankan relasi, bukan sekadar distribusi material. Horsley, (2007) juga menambahkan bahwa konteks 2 Korintus memperlihatkan keseimbangan antara dimensi spiritual dan material, di mana kasih karunia Allah mendorong partisipasi sukarela, bukan kewajiban hukum. Dengan demikian, kesetaraan dalam tubuh Kristus menjadi nilai normatif yang menantang paradigma dunia yang cenderung menimbun kekayaan serta mengesampingkan nilai-nilai luhur dari hubungan atau relasi yang bersifat murni serta betul memerhatikan kepentingan sesama serta pemerataan kebutuhan dan berkat (Garland, 2021). Prinsip “keseimbangan” (*isotēs*) yang Paulus tekankan bukan hanya konsep spiritual, tetapi mengandung implikasi sosial yang nyata. Dalam konteks ini, konsep tersebut relevan dengan dinamika jemaat urban yang menghadapi disparitas ekonomi akibat kapitalisme modern, inflasi perkotaan, dan ketidaksetaraan akses kesempatan. Dengan demikian, eksegesi 2 Kor 8:13–15 tidak berhenti pada rekonstruksi historis, tetapi membuka arah etis bagi gereja untuk merancang model solidaritas yang kontekstual.

Analisis terhadap istilah kunci memperlihatkan kedalaman teologis teks ini. Kata “isotes” (*ισότης*) dalam ayat 14, sering diterjemahkan sebagai “kesamaan” atau “keseimbangan,” membawa makna relasi yang adil dalam komunitas, bukan penyamaan mutlak (Garland, 2021). Paulus menekankan prinsip bahwa yang berkelebihan (*perisseuma*) menopang yang kekurangan (*hysterema*). Istilah ini menegaskan dimensi material dari teks, menunjukkan bahwa kesetaraan yang dimaksud Paulus mencakup kebutuhan nyata jemaat, bukan sekadar kesetaraan spiritual. Harris, (2013) menambahkan bahwa penggunaan istilah ini menantang norma budaya patron-klien di dunia Romawi, yang menekankan hierarki dan ketergantungan. Paulus menggeser paradigma tersebut menjadi relasi setara dalam kasih Kristus.

Paulus juga menghubungkan perintahnya dengan tradisi Perjanjian Lama, khususnya peristiwa manna di padang gurun (Kel. 16:18). Kutipan ini mengingatkan bahwa Allah menyediakan kebutuhan umat-Nya secukupnya, tanpa ada yang kekurangan atau berkelebihan. Brueggemann, (2018) menyebut narasi manna sebagai ekonomi alternatif yang

menolak logika penimbunan. Dengan mengutip teks ini, Paulus menegaskan bahwa prinsip pemerataan bukanlah gagasan baru, melainkan konsisten dengan cara Allah membentuk umat-Nya sejak semula. Wright, (2004) bahkan menegaskan bahwa shalom Allah tidak mungkin terwujud tanpa adanya keseimbangan material yang menopang kesejahteraan bersama.

Lebih jauh, eksegesis ini harus dibaca dalam kerangka kasih karunia Kristus. Sebelumnya, Paulus menekankan bahwa “kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus” (2Kor. 8:9). Kasih Kristus yang rela menjadi miskin demi memperkaya banyak orang menjadi dasar teologis untuk tindakan memberi (Horsley, 2007). menyebut hal ini sebagai *grace economy*, di mana motivasi memberi bukan berasal dari hukum atau kewajiban, melainkan partisipasi sukarela dalam karya Allah (Hafemann, 1990). menambahkan bahwa ekonomi kasih karunia ini melampaui transaksi material; ia membentuk identitas gereja sebagai komunitas alternatif yang menantang tatanan sosial dunia.

Relevansi bagi jemaat Korintus semakin jelas bila dikaitkan dengan karakter kota tersebut. Korintus adalah kota pelabuhan dengan mobilitas ekonomi tinggi, namun juga penuh ketimpangan antara pedagang kaya dan kelompok pekerja miskin. Dalam konteks itu, ajaran Paulus mengenai pemerataan merupakan kritik profetis terhadap budaya konsumerisme dan individualisme kota tersebut (Meggitt, 1998). Dengan memberi bagi jemaat Yerusalem, jemaat Korintus sedang dipanggil untuk menghidupi kesatuan tubuh Kristus secara nyata, melampaui batas etnis, sosial, dan ekonomi.

Dari hasil eksegesis ini dapat disimpulkan bahwa prinsip Paulus dalam 2 Korintus 8:13–15 bukan sekadar ajaran filantropi atau praktik karitatif sesaat. Ia merupakan paradigma etis yang menekankan solidaritas struktural, keseimbangan dalam komunitas iman, dan kesetiaan terhadap tradisi Allah yang sejak semula menentang penindasan dan ketidakadilan. Teks ini menantang gereja masa kini untuk melihat dirinya bukan hanya sebagai pemberi bantuan, tetapi sebagai agen transformasi sosial yang menghadirkan tanda shalom Allah melalui relasi yang setara, adil, dan saling menopang.

Berdasarkan eksegesis para ahli tersebut, penulis berpendapat bahwa prinsip *isotēs* Paulus tidak dapat dipahami sebagai ideal spiritual semata, melainkan sebuah etika komunitas yang menuntut penerapan praktis dalam konteks gereja urban Indonesia yang mengalami ketimpangan sosial internal. Karena itu, nilai keseimbangan yang ditegaskan Paulus memiliki daya kritis terhadap gaya hidup konsumtif dan individualistik yang tampak dalam sebagian jemaat. Temuan eksegetis ini menunjukkan bahwa *isotēs* bukan konsep abstrak, tetapi praktik sosial yang mengharuskan gereja membangun pola relasi yang saling menopang. Karena itu, penulis berargumentasi bahwa eksegesis 2 Korintus 8:13–15 memberikan fondasi teologis yang kuat bagi gereja Indonesia untuk keluar dari pola pelayanan karitatif jangka pendek menuju pemberdayaan yang berkelanjutan.

Jurang Ketidakadilan serta Ketimpangan Ekonomi dan Kesenjangan Sosial yang menjadi Tantangan bagi Gereja

Meskipun Indonesia tidak berada dalam kondisi krisis ekstrem, data empiris menunjukkan adanya ketimpangan struktural yang konsisten (Purwanti, 2024). Ketimpangan ini

memengaruhi akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan mobilitas sosial (Burhanudin, Susilastuti, & Sugiyanto, 2025). Oleh karena itu, pembahasan ini tidak bertujuan melebihi-lebihkan situasi, tetapi menempatkan gereja dalam percakapan etis mengenai bagaimana nilai-nilai Paulus memberi orientasi untuk membangun keseimbangan dalam komunitas Kristen.

Dalam perspektif etika Kristen, korupsi bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah spiritual. Stott (2006) menyebutnya sebagai bentuk penyembahan berhala terhadap mamon, ketika kepentingan pribadi ditempatkan di atas kesejahteraan bersama (Stott & Wyatt, 2006). Oleh karena itu, gereja dipanggil untuk menghadirkan kesaksian alternatif melalui integritas, transparansi, dan keberpihakan kepada mereka yang miskin.

Fenomena krisis kepercayaan publik tidak dapat dilepaskan dari akar ketidakadilan sosial-ekonomi. Ketika korupsi merajalela dan kesenjangan pendapatan melebar, masyarakat bukan hanya kehilangan keyakinan pada integritas pemimpin, tetapi juga pada struktur sosial yang seharusnya menopang kesejahteraan bersama (Aspinall & Mietzner, 2019). Kondisi ini menuntut analisis yang lebih luas, sebab ketimpangan tidak hanya terjadi dalam lingkup lokal, melainkan juga merupakan bagian dari pola global yang memengaruhi hampir seluruh negara (Christensen, Hallum, Maitland, Parrinello, & Putaturo, 2023).

Dalam kerangka inilah prinsip Paulus dalam 2 Korintus 8:13–15 menemukan relevansinya. Pesan tentang keseimbangan bukanlah wacana spiritual yang terisolasi, melainkan visi etis yang menantang pola akumulasi kapital baik di tingkat nasional maupun global (Wright, 2004). Dengan demikian, sebelum masuk pada refleksi eklesiologis mengenai etika kesetaraan, penting untuk meninjau realitas pemerataan ekonomi secara lebih luas, agar dimensi profetis teks Paulus dapat dibaca bukan hanya untuk jemaat internal, melainkan juga sebagai panggilan sosial bagi masyarakat dan bangsa (Volf, 2011).

Ketimpangan ekonomi bukan hanya isu lokal di Indonesia, melainkan fenomena global yang mengancam stabilitas sosial. Laporan Oxfam International menunjukkan bahwa 1% populasi dunia menguasai hampir setengah dari total kekayaan global, sementara miliaran orang masih hidup dalam kemiskinan ekstrem (Christensen et al., 2023). Pola akumulasi kapital yang tidak merata ini menimbulkan ketegangan sosial, memperbesar jurang kelas, dan memperlemah legitimasi institusi publik (Group, 2022).

Dalam konteks Indonesia, tantangan ini juga nyata. Data rasio gini Indonesia yang juga masih tergolong tinggi dan menandakan distribusi pendapatan yang tidak merata, maupun juga data dari Bank Dunia yang menyatakan bahwa 40% kelompok terbawah di Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dibandingkan kelompok menengah dan atas (Group, 2022). Ketidakmerataan ini diperparah oleh kemiskinan struktural: akses pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja yang timpang antarwilayah (Braathen, May, Ulriksen, & Wright, 2016).

Lebih jauh, kesenjangan ekonomi juga memiliki implikasi dalam ruang publik. Milanovic berargumen bahwa ketimpangan global menciptakan “ekonomi dualistik” di mana segelintir orang menikmati keuntungan globalisasi, sementara mayoritas tertinggal (Milanovic, 2016). Jika gereja hanya hadir dalam bentuk bantuan sesaat, jemaat akan tetap berada dalam siklus kerentanan. Sebaliknya, ketika gereja membangun program yang

memperkuat struktur—seperti koperasi jemaat, pelatihan kewirausahaan, atau advokasi kebijakan publik—maka gereja turut serta menghadirkan tanda-tanda *Kerajaan Allah* yang menuntut keadilan sosial (Volf, 2011).

Dengan demikian, penelitian ini menempatkan ketimpangan ekonomi sebagai tantangan teologis sekaligus praksis. Frase Paulus dalam 2 Korintus 8:13–15 mengundang gereja masa kini untuk tidak berdiam diri dalam kenyamanan internal, tetapi menghadirkan solidaritas nyata yang menysar struktur sosial. Prinsip “tidak ada yang berkekurangan dan tidak ada yang berlebihan” bukan hanya norma bagi jemaat, melainkan juga kontribusi etis gereja bagi masyarakat luas.

Walaupun Indonesia tidak berada dalam kondisi krisis ekstrem seperti beberapa negara lain, penulis berargumentasi bahwa ketimpangan tetap menjadi persoalan moral yang harus disikapi gereja. Ketimpangan tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga relasional—memengaruhi kepercayaan, partisipasi sosial, dan kualitas hidup jemaat. Karena itu, gereja memiliki tanggung jawab teologis untuk menjadi ruang pemulihan yang mencegah jurang sosial melebar di dalam tubuh Kristus.

Tabel Kontras Ketimpangan dan Prinsip Paulus

Aspek	Realitas Global/Nasional	Prinsip Paulus (2Kor. 8:13–15)	Implikasi bagi Gereja
Distribusi Kekayaan	1% populasi dunia menguasai hampir 50% kekayaan (Christensen et al., 2023)	Yang berlebihan menopang yang kekurangan	Gereja membangun ekosistem solidaritas & pemberdayaan
Ketimpangan Nasional	Rasio Gini Indonesia 0,388; kemiskinan struktural masih tinggi (Purwanti, 2024)	Supaya ada keseimbangan	Program koperasi, kredit mikro, pelatihan keterampilan
Dampak Sosial	Legitimasi pemerintah melemah, krisis kepercayaan (Aspinall & Mietzner, 2019)	Solidaritas tubuh Kristus menjaga kesatuan	Gereja hadir sebagai saksi profetis & agen transformasi
Implikasi Globalisasi	Ekonomi dualistik: segelintir menikmati globalisasi (Milanovic, 2016)	Semua anggota tubuh dipelihara oleh kasih Kristus	Gereja mendorong keadilan struktural, bukan sekadar amal

Prinsip-prinsip Paulus dalam 2 Korintus 8:13–15 diatas sangat relevan ketika dibandingkan dengan realitas ketimpangan ekonomi global maupun nasional. Ketika 1%

populasi dunia menguasai hampir setengah kekayaan global, teks Paulus menantang logika akumulasi dengan mengajak yang berkelebihan menopang yang kekurangan (Chancel, Piketty, Saez, & Zucman, 2022). Demikian pula, dalam konteks Indonesia, rasio gini yang masih tinggi memperlihatkan jurang struktural yang nyata (Purwanti, 2024). Prinsip “supaya ada keseimbangan” menginspirasi gereja untuk mengembangkan bentuk-bentuk konkret solidaritas ekonomi, seperti koperasi, pelatihan keterampilan, dan kredit mikro bunga rendah.

Selain itu, berdasarkan tabel diatas, krisis kepercayaan terhadap pemerintah menunjukkan bahwa masyarakat haus akan teladan institusi yang transparan dan adil (Aspinall, 2010). Di titik inilah gereja dapat menghadirkan diri sebagai saksi profetis, menjaga kesatuan tubuh Kristus, sekaligus menunjukkan bahwa integritas dapat dipraktikkan. Bahkan dalam konteks globalisasi yang cenderung menimbulkan ekonomi dualistik, prinsip Paulus tetap menuntun bahwa semua anggota tubuh dipelihara dalam kasih Kristus (Milanovic, 2016). Dengan demikian, gereja dipanggil untuk mendorong realisasi keadilan struktural yang mampu menjawab tantangan ekonomi nasional maupun global.

Dengan menempatkan realitas ketimpangan berdampingan dengan prinsip Paulus, penulis berargumentasi bahwa gereja memiliki posisi strategis untuk menjadi jembatan antara nilai teologis dan kebutuhan sosial. Tabel ini memperlihatkan bahwa prinsip kesetaraan Paulus bukan hanya relevan, tetapi sangat kompatibel dengan problem obyektif yang dihadapi masyarakat Indonesia.

Kesetaraan dalam Tubuh Kristus

Paulus mengajarkan bahwa prinsip “tidak ada yang berkekurangan dan tidak ada yang berkelebihan” sejalan dengan visi *shalom* Allah. Wright (2004) mendefinisikan *shalom* sebagai kesejahteraan menyeluruh: relasional, struktural, dan spiritual (Wright, 2004). Dalam jemaat mula-mula, solidaritas diwujudkan melalui pembagian kepemilikan secara sukarela, sehingga “tidak ada seorang pun yang berkekurangan” (Kis. 4:34). Konsep *shalom* dalam literatur teologi modern menempatkan kesejahteraan sebagai holistik (relasional, struktural, spiritual), selain itu konsep *shalom* menurut Brueggemann juga menyoroti fungsi profetis Alkitab untuk membongkar struktur yang menindas dan membayangkan tatanan sosial alternatif berdasarkan keadilan Allah tatanan yang berupa struktur sosial yang adil dan menutup celah ketimpangan (Wright, 2004; Brueggemann, 2018). Teolog kontemporer menegaskan bahwa panggilan gereja tidak hanya amal ad hoc tetapi juga pemulihan relasi & struktur sosial, iman Kristen harus diwujudkan di ruang publik, bukan hanya amal kecil (Volf, 2011). Kondisi ini menggarisbawahi pentingnya gereja untuk tidak hanya fokus pada pelayanan karitatif, tetapi juga mendorong transformasi struktural. Paulus menekankan bahwa yang berkelebihan harus menolong yang kekurangan supaya tercipta keseimbangan (2Kor. 8:13–15). Prinsip ini melampaui logika filantropi karena bersifat normatif—ia meneguhkan solidaritas dalam tubuh Kristus sebagai refleksi dari kasih Allah. Teolog seperti Wright, (2004) dan Brueggemann, (2018) menegaskan bahwa visi *shalom* Alkitab meliputi tatanan sosial yang adil, bukan sekadar kedamaian spiritual.

Gereja masa kini dapat menafsirkan ulang prinsip tersebut dalam konteks ekonomi modern. Pemerataan bukan berarti menyeragamkan hasil yang mana akan sulit dilakukan karena setiap orang memiliki kebebasan untuk dapat mencari berdasarkan potensi dan kemampuan yang dimiliki, tetapi menciptakan ekosistem solidaritas di mana yang kuat menopang yang lemah. Praktik ini bisa diwujudkan misalnya saja melalui koperasi gereja, kredit mikro berbunga rendah, pelatihan keterampilan, serta dana solidaritas jemaat. Dengan cara ini, gereja menghadirkan etika kesetaraan yang bersumber dari kasih Kristus dan relevan dengan konteks kontemporer.

Prinsip *isotēs* dalam 2 Korintus 8:13–15 menuntun gereja untuk membangun pola redistribusi internal yang terstruktur, misalnya melalui dana kesetaraan jemaat berbasis kontribusi proporsional (Downs, 2016). Pelatihan literasi finansial bagi jemaat rentan (Silitonga, 2023). Model koperasi gereja yang mencerminkan praktik jemaat mula-mula dalam Kisah Para Rasul.

Penulis menegaskan bahwa tanpa struktur kesetaraan, gereja berpotensi mereproduksi ketimpangan sosial yang sama dengan masyarakat luas. Karena itu, tindakan konkret seperti pendampingan ekonomi, kelompok berbagi sumber daya, dan dana solidaritas bukan sekadar program sosial, tetapi bentuk ketaatan pada teologi Paulus mengenai *isotēs*. Dengan kata lain, kesetaraan bukanlah respons opsional, melainkan ekspresi moral dari identitas gereja sebagai tubuh Kristus.

Implikasi Praktis bagi Gereja Masa Kini

Berdasarkan eksegesis 2 Korintus 8:13–15, terdapat tiga dimensi utama yang dapat diterapkan gereja dalam menjawab realitas sosial-ekonomi masa kini. Prinsip Paulus tentang “tidak ada yang berlebihan dan tidak ada yang berkekurangan” harus dipahami bukan hanya sebagai etika personal, melainkan paradigma struktural yang membentuk praksis gereja.

Solidaritas Internal

Prinsip Paulus dalam 2 Korintus 8:13–15 menekankan bahwa yang berlebihan harus menopang yang berkekurangan, sehingga tercipta *isotes* (keseimbangan). Konteks *manna* di Keluaran 16 yang ia kutip menegaskan bahwa sejak awal Allah tidak menghendaki penimbunan, tetapi pemerataan. Dalam tubuh Kristus, kesetaraan bukan pilihan moral opsional, melainkan panggilan normatif. Gereja masa kini harus menerjemahkan nilai ini melalui solidaritas internal yang nyata. Misalnya, pengembangan dana solidaritas jemaat, koperasi gereja, atau kredit mikro dengan bunga rendah yang membantu anggota jemaat keluar dari jerat utang konsumtif. Gereja harus memastikan tidak ada anggota jemaat yang terlantar. Penelitian lokal menunjukkan bahwa praktik koperasi gereja di beberapa daerah Indonesia mampu mengurangi kerentanan ekonomi jemaat. Contohnya terdapat pada studi kasus koperasi gereja di Batam dan beberapa daerah yang menunjukkan model pemberdayaan jemaat yang menunjukkan hasil yang mengurangi kerentanan ekonomi melalui model distribusi berbasis kebutuhan (Purba & Pangihutan, 2022). Demikian juga, Silitonga, (2023) mencatat peran kelompok simpan pinjam jemaat yang berhasil membangun

kemandirian ekonomi rumah tangga miskin. Dengan demikian, pelayanan diakonia bukan sekadar bantuan karitatif sesaat, tetapi benar-benar wujud konkret dari prinsip Paulus bahwa dalam tubuh Kristus tidak boleh ada yang berkekurangan. Solidaritas internal ini sekaligus menjadi saksi bahwa kasih Allah dapat mengatasi krisis kesenjangan yang gagal diselesaikan oleh struktur negara. Berdasarkan prinsip *isotēs*, solidaritas internal jemaat bukanlah bentuk belas kasihan, tetapi mandat teologis untuk memelihara keseimbangan relasional dalam tubuh Kristus.

Teladan Integritas

Eksegesis 2 Korintus 8 juga memperlihatkan bahwa Paulus menolak pola patron-klien Romawi yang kerap menjerumuskan orang miskin dalam relasi eksploitatif. Sebagai gantinya, ia menekankan partisipasi sukarela dan relasi yang setara, yang bersumber dari kasih karunia, bukan kewajiban hukum (Horsley, 2007). Di sini terlihat bahwa integritas adalah nilai utama: memberi bukan untuk menguasai, melainkan untuk membangun kesetaraan. Gereja masa kini dapat menerjemahkan prinsip ini dengan menjadi teladan integritas dalam pengelolaan sumber daya. Transparansi keuangan, audit internal yang konsisten, serta kode etik yang ketat menjadi cara modern untuk menghindari “kelebihan” yang berujung pada penyalahgunaan. Hauerwas & Willimon, (2014) menekankan bahwa gereja harus menjadi komunitas teladan, bukan hanya pengajar moral. Hal ini sejalan dengan riset Abd Majid, Azhari, Faisal, & Fahlevi, (2022) yang menyoroti pentingnya praktik akuntabilitas sipil sebagai fondasi kepercayaan publik. Dengan demikian, ketika gereja menjaga integritas, ia bukan hanya menjaga diri sendiri, tetapi juga menerapkan etika Paulus: mencegah akumulasi kekuasaan atau kekayaan pada segelintir orang. Integritas internal adalah cara kontemporer mewujudkan prinsip “tidak ada yang berkelebihan,” karena melalui transparansi, kelebihan yang ada bisa terus diarahkan untuk keseimbangan dalam tubuh Kristus. Tanpa integritas dan transparansi, gereja tidak dapat menjadi saksi teologis dari *isotēs* Paulus, karena keseimbangan tidak mungkin hadir dalam struktur yang tidak adil.

Peran Profetis di Ruang Publik

Paulus tidak hanya menekankan solidaritas di dalam jemaat lokal Korintus, tetapi juga menjembatani kesenjangan antara jemaat makmur di Korintus dengan jemaat miskin di Yerusalem. Solidaritas lintas komunitas ini menegaskan bahwa prinsip *isotes* berlaku dalam skala yang lebih luas, bahkan lintas bangsa (Georgi, 1992; Garland, 2021). Dengan demikian, etika kesetaraan bukan hanya untuk internal gereja, melainkan juga memiliki implikasi sosial yang luas. Dalam konteks Indonesia, gereja perlu menjalankan peran profetis dengan mengambil bagian dalam advokasi sosial, pendidikan politik yang sehat, dan kerja sama dengan komunitas sipil untuk memperjuangkan kebijakan publik yang adil (Mamahit, 2005). Hal ini bisa berupa keterlibatan dalam isu-isu kemiskinan struktural, akses pendidikan, atau kebijakan ekonomi yang timpang. Volf, (2011) menegaskan bahwa kesaksian Kristen sejati harus melintasi batas komunitas, membangun solidaritas lintas agama, etnis, dan kelas sosial. Dengan demikian, gereja masa kini tidak cukup hanya membangun solidaritas internal atau teladan integritas, tetapi juga harus berani bersuara di ruang publik. Peran profetis ini

merupakan wujud nyata dari prinsip Paulus bahwa dalam tubuh Kristus tidak boleh ada yang berkekurangan. Di tengah krisis kepercayaan terhadap negara, gereja dapat menjadi tanda harapan—bukan sebagai institusi partisan, tetapi sebagai saksi profetis yang menegaskan shalom Allah di bumi. Prinsip *isotēs* memberikan dasar teologis bagi gereja untuk menyuarakan keadilan sosial secara non-partisan. Dengan demikian, gereja dapat menjadi agen rekonsiliasi yang membawa nilai-nilai Kerajaan Allah ke ruang publik.

Tabel Relevansi Prinsip Paulus dengan Realitas di Indonesia

Prinsip Paulus (2 Kor. 8:13–15)	Realitas Sosial Indonesia	Implikasi bagi Gereja
<i>Tidak ada yang berkekurangan</i>	Banyak jemaat dan masyarakat yang masih miskin	Dana solidaritas jemaat, koperasi gereja
<i>Tidak ada yang berkelebihan</i>	Elit menguasai sebagian besar aset	Pendidikan integritas, distribusi berkeadilan
<i>Kesetaraan dalam tubuh Kristus</i>	Krisis kepercayaan publik	Gereja hadir sebagai saksi profetis keadilan

Implikasi Sosial Bagi Masyarakat

Relevansi prinsip “tidak ada yang berkelebihan dan tidak ada yang berkekurangan” tidak berhenti pada lingkup internal gereja. Solidaritas yang dibangun dalam tubuh Kristus akan berdampak keluar, memberi teladan dan kontribusi nyata bagi masyarakat luas. Gereja yang mempraktikkan transparansi, akuntabilitas, dan distribusi yang adil menunjukkan bahwa integritas tata kelola bukan sekadar jargon, melainkan mungkin diwujudkan. Hal ini memberikan inspirasi bagi lembaga sosial, komunitas sipil, bahkan pemerintahan lokal untuk mengadopsi praktik serupa (Volf, 2011).

Lebih jauh, program gereja seperti koperasi jemaat, kredit mikro, pelatihan keterampilan, atau pelayanan kesehatan dapat bersifat inklusif, melibatkan masyarakat sekitar tanpa memandang latar belakang agama. Dengan demikian, gereja berfungsi sebagai *salt and light*—menghadirkan kesejahteraan bersama yang melampaui batas internal komunitas iman (Myers, 2011).

Implikasi sosial ini menegaskan bahwa etika kesetaraan yang Paulus visikan bukan sekadar ideal moral, tetapi sebuah paradigma transformasional. Ketika gereja hidup dalam pola saling menopang, maka masyarakat sekitar merasakan buah dari solidaritas itu. Dengan demikian, visi Paulus tentang keseimbangan dalam 2 Korintus 8:13–15 menjadi tanda awal dari Kerajaan Allah yang hadir di bumi melalui relasi yang adil, penuh kasih, dan berorientasi pada pemulihan (Escobar, 2013).

Penelitian terkini menunjukkan bahwa gereja bisa berperan signifikan dalam pemberdayaan ekonomi jemaat melalui model koperasi internal, pelatihan keterampilan, dan usaha komunitas. Sebagai contoh, dalam kajian terhadap gereja di Kota Kupang, dibuktikan bahwa pembentukan koperasi jemaat membantu mengurangi beban ekonomi keluarga

menjadi upaya konkrit menghadirkan keadilan sosial di dalam tubuh Kristus (Gultom, Christanto, Pradipta, Sumual, & Pakpahan, 2022). Lebih jauh, studi di Bali menemukan bahwa program ekonomi jemaat yang dikelola gereja mampu memperbaiki kesejahteraan anggota jemaat, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi sektor pariwisata (Yurianta, Junaedi, Trimurti, & Utama, 2025). Temuan-temuan ini memperlihatkan bahwa penerapan prinsip teologis “tidak ada yang berkekurangan dan tidak ada yang berkelebihan” tidak harus tetap normatif, tetapi bisa diwujudkan dalam tindakan nyata yang relevan secara sosial dan ekonomi.

Dengan menerapkan prinsip *isotēs*, gereja dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat melalui pemberdayaan komunitas, penguatan ekonomi lokal, dan pembangunan jaringan sosial. Penelitian Nasution, Syahputra, Dayu, & Armayani, (2023) menunjukkan bahwa keterlibatan komunitas keagamaan dalam program penguatan UMKM meningkatkan ketahanan ekonomi warga. Hal ini memperlihatkan bahwa nilai kesetaraan tidak hanya menguntungkan gereja, tetapi juga membawa dampak sosial yang lebih luas.

Tabel Prinsip Paulus dan Implikasi Sosialnya

Prinsip Paulus (2 Kor. 8:13–15)	Implikasi bagi Gereja	Dampak Inklusif bagi Masyarakat
<i>Tidak ada yang berkekurangan</i>	Solidaritas internal melalui dana jemaat, koperasi, dan pelayanan diakonia	Masyarakat sekitar terbantu melalui akses ekonomi (kredit mikro, pasar murah, pelatihan kerja)
<i>Tidak ada yang berkelebihan</i>	Transparansi, akuntabilitas, dan pembatasan gaya hidup konsumtif pemimpin	Menjadi teladan tata kelola bagi komunitas sipil dan pemerintah lokal
<i>Kesetaraan dalam tubuh Kristus</i>	Relasi jemaat yang saling menopang, tanpa diskriminasi	Menumbuhkan inklusivitas: pelayanan kesehatan, pendidikan, dan program sosial yang terbuka bagi semua

(“Together towards Life: Mission and Evangelism in Changing Landscapes,” 2012)

(DeYoung & Gilbert, 2011)

Hasil dan Kebaruan Penelitian

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa frase “tidak ada yang berkekurangan dan tidak ada yang berkelebihan” mengandung paradigma pemerataan yang bersifat normatif dan profetis. Kebaruan penelitian ini terletak pada penekanan bahwa prinsip Paulus bukan sekadar praktik memberi atau filantropi, melainkan etika kesetaraan struktural yang dapat diaplikasikan oleh gereja di Indonesia masa kini.

Hal ini penting karena gereja sering kali hanya mempraktikkan pelayanan karitatif, padahal panggilannya lebih jauh: menjadi agen transformasi sosial yang menghadirkan

shalom Allah. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya wacana etika Kristen dengan menekankan dimensi struktural dari solidaritas jemaat.

Penelitian ini menegaskan bahwa frase Paulus bukan hanya tradisi amal: penelitian menunjukkan sebuah paradigma etis yang menysar struktur—menempatkan pemerataan sebagai kewajiban tata-kelola tubuh Kristus. Kebaruan penelitian ini adalah penggabungan kajian exegetis (2Kor 8:13–15) dengan data sosial-kontekstual (BPS; CPI), dan studi praktik gereja lokal (koperasi & praktik transparansi), yang bersama-sama menegaskan peran gereja sebagai agen transformasi struktural, bukan sekadar penyedia bantuan sementara (Garland, 2021; Aspinall & Mietzner, 2019; Purba & Pangihutan, 2022).

REKOMENDASI PENGEMBANGAN PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada pemahaman teologis dan etis dari frase “tidak ada yang berkekurangan dan tidak ada yang berlebihan” dalam 2 Korintus 8:13–15 serta relevansinya bagi gereja masa kini. Hasil penelitian diharapkan dapat memberi dorongan bagi gereja-gereja untuk menafsirkan ulang prinsip kesetaraan dalam tubuh Kristus, tidak hanya dalam bentuk pelayanan karitatif, tetapi juga dalam praktik solidaritas struktural yang berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi tambahan bagi pengembangan kajian etika Kristen, khususnya dalam konteks pemerataan ekonomi jemaat dan pemulihan krisis kepercayaan publik. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengombinasikan pendekatan eksegesis dengan metode lapangan, seperti studi kasus pada jemaat atau denominasi yang sudah mempraktikkan koperasi gereja, program solidaritas ekonomi, maupun model transparansi keuangan, sehingga dapat memperkaya pemahaman teoretis sekaligus memberikan kontribusi praktis yang lebih luas.

Lebih jauh, arah pengembangan penelitian dapat dilakukan secara lintas disiplin. Misalnya, integrasi antara teologi dengan ekonomi pembangunan dapat memperdalam pemahaman tentang strategi pemerataan yang kontekstual, sementara dialog dengan ilmu politik dapat mengkaji bagaimana gereja berperan dalam memperkuat integritas publik dan keadilan sosial. Kolaborasi lintas disiplin semacam ini akan memperluas kontribusi teologi Kristen dalam menjawab persoalan struktural bangsa, sekaligus menunjukkan relevansinya bagi kehidupan masyarakat luas.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa prinsip Paulus dalam 2 Korintus 8:13–15, yakni “tidak ada yang berlebihan dan tidak ada yang berkekurangan”, mengandung paradigma etis yang melampaui praktik amal atau filantropi. Nilai teologis ini merefleksikan panggilan tubuh Kristus untuk membangun kesetaraan, menyeimbangkan kelebihan dan kekurangan, serta menghadirkan tanda nyata dari *shalom* Allah. Dalam praktik gereja masa kini, relevansi prinsip tersebut perlu penilaian dari tiga ranah transformasi. Pertama, di dalam jemaat, gereja dipanggil untuk menghidupi solidaritas internal melalui pelayanan diakonia yang berkelanjutan dan sistem dukungan ekonomi jemaat. Kedua, di level tata kelola, gereja harus menjadi teladan integritas dengan transparansi keuangan, akuntabilitas, dan budaya anti-korupsi yang konsisten. Ketiga, dalam relasi dengan masyarakat luas, gereja harus bersuara

profetis terhadap ketidakadilan sosial dan mengambil bagian dalam upaya pemberdayaan ekonomi serta advokasi kebijakan publik yang berkeadilan.

Lebih jauh, penelitian ini juga menunjukkan bahwa prinsip kesetaraan Paulus memiliki daya transformatif yang tidak terbatas pada lingkup gereja, tetapi relevan bagi pergumulan masyarakat global terhadap ketimpangan ekonomi dan krisis kepercayaan pada institusi publik. Gereja yang setia pada panggilan ini dapat menjadi saksi eskatologis—menghadirkan tanda Kerajaan Allah yang adil dan damai di tengah dunia yang terpecah oleh kesenjangan. Di sisi lain, relevansi prinsip ini tidak lepas dari tantangan budaya individualisme, konsumerisme, dan pragmatisme yang kerap melemahkan solidaritas. Karena itu, gereja perlu menumbuhkan spiritualitas komunal yang menekankan kasih, kesederhanaan, dan keberanian untuk melawan arus.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa nilai isotēs (ισότης) yang diajarkan Paulus dalam 2 Korintus 8:13–15 bukan sekadar ajaran moral mengenai kemurahan hati, tetapi merupakan kerangka etika relasional dan struktural yang mampu menjembatani kesenjangan antara spiritualitas gereja dan kebutuhan sosial masyarakat modern. Dalam konteks gereja mula-mula, isotēs hadir sebagai prinsip korektif terhadap ketimpangan sosial yang memengaruhi relasi antarjemaat. Prinsip ini tidak meniadakan perbedaan kapasitas ekonomi, tetapi menegaskan bahwa relasi dalam tubuh Kristus harus mencerminkan keseimbangan (fairness), saling melengkapi (mutuality), dan kesalingan (reciprocity) yang berakar pada kasih karunia Kristus.

Interpretasi ini memiliki implikasi signifikan bagi gereja masa kini. Secara relasional, nilai isotēs menuntun gereja untuk membangun komunitas yang inklusif, sensitif terhadap kerentanan internal, dan mampu memastikan bahwa tidak ada anggota yang terabaikan. Secara struktural, nilai ini mengarahkan gereja untuk melampaui praktik diakonia karitatif menuju model pemberdayaan yang transformasional melalui mekanisme solidaritas, akuntabilitas, serta pembangunan kapasitas ekonomi jemaat. Dengan demikian, isotēs menawarkan fondasi teologis yang memungkinkan gereja merespons ketimpangan sosial secara lebih sistematis dan berkelanjutan.

Lebih jauh, ketika isotēs diintegrasikan dengan konteks sosial Indonesia yang ditandai dengan ketimpangan pendapatan, kerentanan ekonomi, dan minimnya akses yang merata terhadap kesejahteraan, prinsip ini memperlihatkan urgensi yang lebih kuat. Gereja dipanggil tidak hanya menjadi ruang spiritual, tetapi juga agen transformasi sosial yang menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah melalui tindakan konkrit. Penerapan isotēs mendorong gereja untuk membangun model solidaritas internal, memperkuat integritas kelembagaan melalui transparansi, serta memperluas peran profetis di ruang publik melalui advokasi keadilan sosial.

Karena itu, dapat disimpulkan bahwa nilai isotēs Paulus menyediakan kerangka etis yang komprehensif untuk menjawab tantangan gereja masa kini: menyeimbangkan spiritualitas dan praksis sosial. Jika diterapkan dengan konsisten, nilai ini tidak hanya memulihkan relasi internal jemaat, tetapi juga memberdayakan gereja untuk berkontribusi secara nyata dalam membentuk masyarakat yang lebih adil, seimbang, dan manusiawi. Penelitian ini menemukan bahwa prinsip isotēs dalam 2 Korintus 8:13–15 bukan sekadar

ajakan untuk berbagi, tetapi merupakan kerangka etika yang menata relasi dalam tubuh Kristus. Berdasarkan eksegeze dan kajian para ahli (Downs, Furnish, Harris), nilai isotēs mencakup keseimbangan timbal balik, kesalingan, dan kecukupan yang menjadi dasar hidup komunitas Kristen. Penelitian ini berargumen bahwa nilai tersebut memiliki daya kritis terhadap struktur ketidakadilan sosial, karena menempatkan kesejahteraan bersama sebagai ekspresi iman yang berakar dalam kasih karunia.

Temuan ini menunjukkan bahwa gereja dipanggil untuk menjadi komunitas alternatif yang menghadirkan keseimbangan sosial melalui tiga dimensi utama: solidaritas internal yang memastikan tidak ada anggota jemaat yang kekurangan, tata kelola yang transparan sebagai wujud integritas komunitas, dan aksi sosial transformatif yang menjawab kebutuhan masyarakat luas. Dengan demikian, relevansi dan penerapan nilai isotēs tidak hanya membentuk gereja yang inklusif dan adil, tetapi juga memungkinkan gereja berperan sebagai agen pembaruan yang menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah di tengah konteks sosial Indonesia yang masih ditandai ketimpangan.

BIODATA



Ricard Lieberth, S.Kom

Ricard Lieberth adalah mahasiswa pasca sarjana. Sekolah tinggi Teologi Kharisma Bandung. Bekerja sebagai wiraswasta di sebuah perusahaan kecil di Jakarta di bidang jasa kursus seni, dan juga sebagai hamba Tuhan di berbagai bidang proyek sosial seperti @jangkau.id dan @circunomy.id.

Surel : htrebeil88@gmail.com



Assoc. Prof. Dr. Yanto Paulus Hermanto, M.Th

Assoc. Prof. Dr. Yanto Paulus Hermanto, M.Th adalah dosen dan ketua Sekolah Tinggi Teologi Kharisma Bandung, Peneliti Qualitative Research (CIQaR), Pendeta di GBI Bethel Bandung dan sebagai Konselor. Dia sudah menulis berbagai karya ilmiah yang berfokus kepada teologia, kepemimpinan dan karakter. Tulisan-tulisannya merupakan

pelayanan bagi generasi untuk berbagai usia yang memberikan kontribusi dalam hal sikap hidup dan moral kekristenan yang berdasarkan Alkitab, serta terus melakukan penelitian yang bertujuan membangun kerajaan-Nya.

Surel : yantopaulush@gmail.com

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Majid, M. S., Azhari, A., Faisal, F., & Fahlevi, H. (2022). What Determines Cooperatives' productivity In Indonesia? A-Two Stage Analysis. *Economics & Sociology*, 15(1), 56–77.
- Aspinall, E. (2010). Indonesia: the irony of success. *Journal of Democracy*, 21(2), 20–34.
- Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). Indonesia's democratic paradox: competitive elections amidst rising illiberalism. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 55(3), 295–317.
- Banjarnahor, A., & Siagian, R. J. (2025). Integrasi Allah yang Turut Menderita dalam Spiritualitas Umat Miskin:: Studi Pengalaman Iman dan Doa Jemaat HKBP Sola Gratia Berdasarkan Teologi Jurgen Moltmann. *Danum Pabelum: Jurnal Teologi Dan Musik Gereja*, 5(2), 14–29.
- Barrett, L. (1998). *Missional church: A vision for the sending of the church in North America*. Wm. B. Eerdmans Publishing.
- Blomberg, C. L. (2001). Neither Poverty nor Riches: A Biblical Theology of Material Possessions. *Pro Ecclesia: A Journal of Catholic and Evangelical Theology*. <https://doi.org/10.1177/106385120101000209>
- Braathen, E., May, J., Ulriksen, M., & Wright, G. C. (2016). *Poverty and inequality in middle income countries: Policy achievements, political obstacles*. Bloomsbury Publishing.
- Brueggemann, W. (2018). *The Practice of Prophetic Imagination*. *The Practice of Prophetic Imagination*. <https://doi.org/10.2307/j.ctt22h6srr>
- Burhanudin, B., Susilastuti, D., & Sugiyanto, S. (2025). Economic Growth And Human Development In Indonesia. *International Journal of Humanity Advance, Business & Sciences (IJHABS)*, 3(1.1), 159–168.
- Chancel, L., Piketty, T., Saez, E., & Zucman, G. (2022). *World inequality report 2022*. Harvard University Press.
- Christensen, M.-B., Hallum, C., Maitland, A., Parrinello, Q., & Putaturo, C. (2023). Survival of the richest: How we must tax the super-rich now to fight inequality.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.

- DeYoung, K., & Gilbert, G. (2011). *What is the mission of the church?: Making sense of social justice, shalom, and the great commission*. Crossway.
- Downs, D. J. (2016). *Alms: Charity, reward, and atonement in early Christianity*. Baylor University Press.
- Escobar, S. (2013). *A time for mission: The challenge for global Christianity*. Langham Publishing.
- Fee, G. D., & Stuart, D. (2014). *How to read the Bible for all its worth*. Zondervan Academic.
- Furnish, V. P. (1984). *Corinthians: A New Translation with Introduction and Commentary*.
- Garland, D. E. (2021). *2 Corinthians: The Christian Standard Commentary*. B&H Publishing Group.
- Georgi, D. (1986). *The opponents of Paul in second Corinthians*. Fortress Press.
- Georgi, D. (1992). *Remembering the poor: the history of Paul's collection for Jerusalem*. Abingdon Press.
- Group, W. B. (2022). *Global economic prospects, January 2022*. World Bank Publications.
- Gultom, J., Christanto, A., Pradipta, D. A., Sumual, I. S., & Pakpahan, G. K. R. (2022). The Church and Humanity: Efforts to Overcome Poverty Problems in Kupang City, NTT. In *International Conference on Theology, Humanities, and Christian Education (ICONTHCE 2021)* (pp. 156–159). Atlantis Press.
- Hafemann, S. J. (1990). *Suffering and ministry in the spirit: Paul's defense of his ministry in II Corinthians 2: 14-3: 3*. Eerdmans Publ. Comp.
- Harris, M. J. (2013). *The second epistle to the Corinthians*. Wm. B. Eerdmans Publishing.
- Hauerwas, S., & Willimon, W. (2014). *Resident Aliens: Life in the Christian Colony (Expanded 25th Anniversary Edition)*. Abingdon Press.
- Horsley, R. A. (2007). The First and Second Letters to the Corinthians. *A Postcolonial Commentary on the New Testament Writings*, 220–245.
- Mamahit, F. Y. (2005). *Globalisasi, Gereja Injili dan Transformasi Sosial*.
- Meggitt, J. (1998). *Paul, poverty and survival*. A&C Black.
- Milanovic, B. (2016). *Global inequality: A new approach for the age of globalization*. Harvard University Press.
- Myers, B. L. (2011). *Walking with the poor: Principles and practices of transformational*

development. Orbis Books.

- Nasution, M. S. A., Syahputra, A., Dayu, W., & Armayani, R. R. (2023). Signifikansi penguatan ekonomi umat berbasis moderasi beragama pada umkm di kota medan. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 4(2), 1451–1468.
- Padakari, S. L., & Gulo, R. P. (2025). Teologi dan keadilan sosial: Peran gereja dalam merespons ketimpangan global. *Tumou Tou*, 12(1), 41–52.
- Purba, G., & Pangihutan, D. (2022). Pendampingan Pengembangan Wawasan Ekonomi Jemaat Gereja Bethel Indonesia Tabgha Batam Center Melalui Sistem Koperasi Tcool Batam. *Jurnal Beatitudes*, 1(1), 1–9.
- Purwanti, E. (2024). Analisis deskriptif profil kemiskinan Indonesia berdasarkan data BPS tahun 2023. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4(1), 1–10.
- Silitonga, P. (2023). Peran Gereja Terhadap Ekonomi Jemaat Dan Upaya Gereja Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Jemaat. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 2(4), 12216–12225.
- Stott, J. R. W., & Wyatt, J. (2006). *Issues facing Christians today*. Zondervan.
- Together towards Life: Mission and Evangelism in Changing Landscapes. (2012). *International Review of Mission*. <https://doi.org/10.1111/j.1758-6631.2012.00126.x>
- Volf, M. (2011). *A public faith: How followers of Christ should serve the common good*. Brazos Press.
- Wright, C. J. H. (2004). *Old Testament Ethics For The People Of God*. Syria Studies.
- Yurianta, I. W. D., Junaedi, I. W. R., Trimurti, C. P., & Utama, I. G. B. R. (2025). The Role of The Church in Building the Economy of The Congregation Members of The Protestant Christian Church in Bali (Case Study at The Protestant Christian Church in Bali). *The Es Economics and Entrepreneurship*, 4(01), 93–107.